



Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	2017	Hal.: I																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

OPINI WTP

Jokowi Sebut Bukan Prestasi

PEMERINTAH ditargetkan bisa mengulangi capaian 2016 dalam hal laporan keuangan. Yakni, mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Untuk mewujudkan hal itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta pemerintah menerapkan sejumlah program guna mendukung penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar.

BPK menemui presiden, Wapres, serta jajaran kementerian dan lembaga di Ruang Garuda Istana Bogor kemarin (5/12). Dalam pertemuan tersebut, presiden meminta jajarannya mengulangi capaian 2016, yakni opini WTP dengan hasil yang lebih baik. "WTP

◆ Ke Halaman 7 kolom 5

Jokowi Sebut Bukan Prestasi

Sambungan dari halaman 1

bukan sebuah prestasi, melainkan memang kewajiban kita dalam menggunakan APBN," ujar presiden.

Menurut dia, opini WTP harus menjadi standar capaian laporan keuangan di semua lembaga. Bila semua telah mampu konsisten, kualitasnya tinggal ditingkatkan sehingga benar-benar tidak ada catatan. Sebab, opini WTP bukan indikator bahwa sebuah kementerian atau lembaga (K/L) bersih dalam hal laporan keuangan. WTP hanya menunjukkan bahwa laporannya sudah sesuai standar yang ditetapkan.

Karena itu, mendapat opini WTP tidak cukup. "Harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi," tegasnya. Untuk mencegah potensi tersebut, pemerintah mengandalkan teknologi informasi dari hulu sampai hilir. Karena itu, saat ini peraturan presiden (perpres) mengenai penerapan *e-planning*, *e-*

budgeting, hingga *e-procurement* tengah disiapkan.

Yang jelas, pemerintah yakin BPK mengaudit secara independen tanpa tendensi apa pun. Dengan begitu, hasil auditnya pun bisa dipertanggungjawabkan. "Saya minta semua kementerian, lembaga negara, pengguna APBN, untuk terbuka kepada BPK," tambahnya.

Sebagai gambaran, pada 2016 laporan keuangan pemerintah pusat mendapat opini WTP dari BPK. Meski demikian, tidak semua K/L mendapat opini WTP. Di antara 88 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan bendahara umum negara, 74 laporan mendapat opini WTP. Delapan laporan mendapat opini wajar dengan pengecualian. Sementara itu, masih ada enam K/L yang mendapat *disclaimer* dari BPK.

BPK menyarankan sejumlah hal agar laporan keuangan pemerintah bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya. Di antaranya, memperbaiki kualitas pertanggungjawa-

ban keuangan negara. Perbaikan itu dilakukan dengan menyajikan laporan yang bebas dari salah saji materi, ketidakpatuhan terhadap UU, atau bahkan kecurangan. Kemudian, internal auditor harus diperkuat agar sistem pengendalian internal juga lebih baik.

Selain itu, pemerintah harus lebih masif dalam menerapkan teknologi informasi yang bisa mendukung laporan keuangan. "Kami sangat berharap ada pusat data keuangan negara yang terintegrasi dan dapat diakses oleh Badan Pemeriksa Keuangan," ujar Ketua BPK Moermahadi Soerja Djane-gara.

Sistem yang terintegrasi akan memungkinkan BPK untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara secara *real time*. Bukan tidak mungkin, BPK bisa langsung mengoreksi bila ada potensi kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satunya dengan meningkatkan implementasi *e-audit*. (byu/c7/oki)